

Pelaksanaan KKN Berparadigma Integrasi-Interkoneksi dalam Menopang Transformasi Masyarakat (Sebuah Rintisan Pendekatan *Participatory Action Research*)

Ahmad Salehudin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ahmad.solehudin@uin-suka.ac.id

Abstrak. *KKN merupakan bagian integral sistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sering perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana paradigm keilmuannya juga berubah menjadi integrasi-interkoneksi, KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta seyogyanya juga menganut paradigm tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ada dua hal yang ingin dijawab dari tulisan ini, yaitu bagaimana paradigma integrasi-interkoneksi dirumuskan dan dilaksanakan dalam bentuk program kerja, dan apa factor penghambat dan pendorongnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian di dua lokasi KKN di dusun Sanggrahan dan Rajek Wetan dengan peserta 30 orang. Agar tidak semata-mata teoritis, penelitian ini metode semi participatory action research. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk merumuskan KKN Integratif-interkoneksi perlu kesadaran bahwa antarilmu (agama dan sekular) harus saling terkait untuk menyelesaikan problem masyarakat. Hambatan yang sering terjadi adalah ketidak pahaman mahasiswa atas peran yang harus dilakukan sebagai peserta KKN.*

Kata kunci: KKN, integrasi-interkoneksi, participatory action research

A. Pendahuluan

Peserta KKN dari UIN Sunan Kalijaga selama ini, sesuai namanya sebagai pendidikan Tinggi Islam, cenderung memposisikan dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan KKN hanya pada wilayah keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari program-program KKN sebelumnya yang jika dianalisis lebih condong pada aspek keberagaman dalam arti sempit saja, seperti pengelolaan TPA, pengaktifan kegiatan-kegiatan di masjid, dan tadarus al-Quran. Program-program tersebut sangat baik, selama dilakukan dengan cara yang tepat berdasarkan nilai fundamental KKN.

Hanya saja para pemangku kepentingan KKN juga harus menyadari bahwa problem-problem yang dihadapi masyarakat tidak semata-mata anak-anak yang tidak mampu membaca al-Quran, masjid sepi dari jamaah, dan para orang tua belum bisa melaksanakan wudhu dan shalat secara tepat, tetapi sangat kompleks dan rumit sehingga tidak cukup mampu diselesaikan hanya dengan pendekatan keagamaan belaka. Misalnya disebuah dusun yang berada dikawasan terpencil, masyarakatnya masuk kategori menengah ke bawah dengan mata pencaharian utamanya bertani dan aktivitas sampingannya sebagai peternak sapi, sebagian besar anak-anak di daerah tersebut tidak sekolah. Melihat fenomena tersebut, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang sedang melakukan KKN tidak cukup membuat program penyuluhan “pentingnya pendidikan” dan “kewajiban menuntut ilmu bagi orang islam. Tetapi perlu melihat persoalan

secara utuh, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut, apakah faktor ekonomi, psikologi, atau pemahaman keagamaan yang kurang tepat.

Banyak persoalan masyarakat yang sedemikian rumit sehingga tidak cukup hanya menggunakan logika keagamaan untuk menyelesaikannya, tetapi perlu menggunakan beragam disiplin keilmuan lainnya atau yang biasa disebut pendekatan multidisiplin untuk memecahkannya. Dalam konteks UIN Sunan Kalijaga, pendekatan multidisiplin tersebut telah dirumuskan dalam sebuah *core values* universitas yang disebut integrasi-interkoneksi.

Dalam buku pedoman KKN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta disebutkan bahwa tujuan KKN di antaranya adalah: (a) membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan; (b) berusaha membantu masyarakat memecahkan problematika yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin; (c) meletakkan agama dan ilmu pengetahuan sebagai pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat sehingga pembangunan merupakan amal ibadah; dan (d) mendapatkan umpan balik untuk bahan penyempurnaan sistem pendidikan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan (Indal Abror [ed], 2009: 15-16). Berdasarkan tujuan tersebut, KKN bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga tidak sekedar persoalan formalitas menggugurkan salah satu kewajiban dari tridarma perguruan tinggi, tetapi mengandung makna yang kompleks, seperti pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan dakwah Islamiyah.

Hanya saja, tujuan ideal pelaksanaan KKN UIN Sunan Kalijaga diatas sering terkendala oleh penyikapan mahasiswa peserta KKN yang menganggap bahwa KKN sekedar ritual yang harus dilewati untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Kondisi ini terkadang diperparah oleh pandangan masyarakat yang menganggap ilmu agama dan ilmu umum terpisah sehingga peserta KKN dari UIN Sunan Kalijaga seringkali hanya dikaitkan dengan TPA dan khutbah Jumat. Akibatnya, pelaksanaan KKN yang memiliki nilai strategis kurang memberikan manfaat, baik bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika fenomena seperti ini tidak disikapi secara tepat, bukan mustahil KKN tidak lagi dapat diandalkan menjadi instrument pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan secara ilmiah pragmatis, dan menjadi motivator dan dinamisator dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta umpan balik keilmuan bagi perguruan tinggi.

Merumuskan KKN berbasis integrasi dan interkoneksi bukan hal yang mudah, terutama bagi mereka yang telah terbiasa berpikir dikotomis, antara ilmu umum dan ilmu agama. Dikotomi ilmu yang salah satunya terlihat dalam dikotomi institusi pendidikan—antara pendidikan umum dan pendidikan agama—telah berlangsung semenjak bangsa ini mengenal sistem pendidikan modern (Mahmud Yunus, 1960). Dikotomi keilmuan Islam tersebut berimplikasi luas terhadap aspek-aspek kependidikan di lingkungan umat Islam, baik yang menyangkut cara pandang umat terhadap ilmu dan pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun psikologi umat pada umumnya.

Munculnya kesadaran di kalangan ilmuwan Muslim bahwa problem keumatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keagamaan, tetapi juga memerlukan bantuan ilmu-ilmu umum, telah memunculkan ide untuk melakukan integrasi-interkoneksi ilmu-ilmu umum dan agama. Persoalannya, pandangan yang melihat ilmu agama dan umum pada posisi dikotomis, terlanjur terpatri dalam kesadaran semua elemen masyarakat, dari level paling bawah hingga pengambil kebijakan. Kondisi ini perlu disikapi dengan langkah-langkah fundamental dan mungkin "politisi" agar paradigma tersebut dapat berubah.

Penelitian ini adalah semi *participatory action research*, yaitu sebuah proses yang dilakukan tidak sekedar mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan, tetapi juga melakukan tindakan "repolitikasi sosial", penyadaran situasi, sehingga perubahan sosial terjadi. Proses penelitian merupakan tindakan

partisipatoris secara terus menerus sehingga membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari: perencanaan (*planning*), tindakan (pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas pelaksanaan rencana), dan refleksi (teoritisasi pengalaman) (Kurt Lewin :1947).

Tulisan ini didesain untuk menjawab pertanyaan (1) bagaimana paradigma integrasi-interkoneksi UIN Sunan Kalijaga dirumuskan dan dilaksanakan dalam bentuk program kerja? (2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam merealisasikan program berparadigma integrasi dan interkoneksi tersebut?

B. KKN UIN Sunan Kalijaga

1. Sejarah KKN UIN Sunan Kalijaga

Peran besar mahasiswa dalam Pemberantasan Buta Huruf dan program-program kemasyarakatan lainnya setelah proklamasi, Bimbingan Masal (BIMAS) peningkatan produksi beras yang dirintis oleh Institut Pertanian Bogor, dan kemudian melibatkan perguruan tinggi lainnya (1963), serta Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Usaha Tenaga Sukarela (BUTSI), menjadi trigger dikeluarkannya kebijakan tentang KKN oleh pemerintah. Berdasarkan manfaat besar program kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan tersebut, pada tahun 1971 Direktur Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Andalas, Padang dan Universitas Hasanudin, Ujung Pandang untuk melaksanakan proyek perintisan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multidisipliner yang didasarkan atas partisipasi mahasiswa.

UIN (IAIN) Sunan Kalijaga melaksanakan KKN kali pertama pada tahun 1976/1977. Sebagaimana perguruan tinggi lainnya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terikat oleh Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan. Pada saat melaksanakan KKN pada tahun akademik 1976/1977 hingga tahun akademik 1979/1980, status KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih bersifat ekstrakurikuler. Artinya, mahasiswa dapat memilih hendak mengikuti KKN atau tidak. Pada tahun 1980, Rektor UIN (IAIN) Sunan Kalijaga H. Zaini Dahlan, MA menerbitkan Surat Keputusan Rektor nomor: 51 Tahun 1980, tertanggal 24 Desember 1980, tentang peningkatan status KKN dari ekstrakurikuler menjadi intrakurikuler. Seiring perubahan status tersebut, maka setiap mahasiswa mengikuti KKN.

Pada tahun akademik 1986/1987, terjadi perubahan sistem pembiayaan KKN. Jika pada awalnya program KKN dibiayai oleh pemerintah melalui Daftar Isian Proyek (DIPA), maka sejak tahun akademik 1986/1987 biaya KKN sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa peserta KKN. Selain itu, sejak tahun 1988 mahasiswa semester VIII telah diperkenankan untuk melaksanakan KKN. Perubahan ini berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor: 122 tahun 1988.

Pada tahun akademik 1999/2000, guna mempersingkat masa studi mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuat kebijakan relatif progresif terkait dengan waktu dan persyaratan KKN. Jika pada awalnya untuk mengikuti KKN harus menyelesaikan 100 % teori, maka sejak tahun akademik 1999/2000 dirubah menjadi minimal 75 %. Selain itu, UIN Sunan Kalijaga juga menambah waktu pelaksanaan KKN, yaitu dari dua kali dalam setahun, menjadi 3 kali. KKN tambahan ini dikenal dengan sebutan KKN Semester Pendek, yaitu memanfaatkan masa jeda semester sekitar bulan Juli dan Agustus.

2. Paradigma KKN UIN Sunan Kalijaga: Integrasi-Interkoneksi

Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga yang diikuti perubahan paradigma keilmuan yang dianut, idealnya juga berpengaruh terhadap konsep KKN. Jika integrasi-interkoneksi menjadi pengejawantahan visi-misi UIN Sunan Kalijaga, maka kurikulum yang menjadi penunjang visi-misi tersebut harus juga memiliki paradigma integrasi-interkoneksi.

Perkembangan paradigma keilmuan di UIN Sunan Kalijaga secara garis besar terdiri dari tiga tahap, yaitu: Pembelajaran Model Entitas Tunggal (*Single Entity*). Pola ini berkembang sekitar tahun 1950-1970-an. Model pembelajaran tipe ini berusaha mempertahankan khazanah Islam era *al ashar al Dzahabiy* (Abad IX-XI), tanpa memperhatikan perkembangan keilmuan dan penelitian di luar dirinya. Pola ini cenderung berprinsip “*almuhafadah ‘ala qodimi assholih*” tanpa “*wal ahdu bi aljadidi al ashlah*”; Pembelajaran Model Entitas Terpisah-pisah (*Isolated Entities*). Tipe ini muncul sekitar tahun 1970-1990. Pada masa ini, telah muncul kesadaran baru, dalam alam pikiran keagamaan (Islam), yaitu adanya 3 entitas disiplin keilmuan: *hadharah alfalsafah*; *hadharah al-ilmu*; dan *hadharah an nash*. Jika dilihat, pada periode ini masih setiap entitas keilmuan masih terpenggal-penggal (dikhotomi) antara ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Bentuk nyata dari dampak dikotomi ini di Indonesia adalah adanya keilmuan ini adalah adanya Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Walaupun telah menyadari adanya tiga entitas keilmuan tersebut, namun karena masih ada dikotomi, maka alumni yang dihasilkan menjadi tidak utuh; Pembelajaran Model Entitas Saling Terhubung Secara Utuh (*Interconnected Entities*). Perkembangan zaman ternyata menyebabkan setiap ilmu baik sekular maupun keagamaan tidak mampu secara mandiri menyelesaikan problem-problem kemanusiaan.

Persoalannya adalah bagaimana kemudian paradigma integrasi-interkoneksi diterapkan dalam konteks KKN? Secara teoritik tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini, karena nilai fundamental KKN mensyaratkan paradigma integrasi-interkoneksi dalam pelaksanaannya. Nilai fundamental tersebut adalah: (1) Keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, (2) Pendekatan interdisipliner dan komprehensif, (3) Lintas sektoral, (4) Dimensi yang luas dan pragmatis, (5) Keterlibatan masyarakat secara aktif.

C. Operasional KKN Integrasi-Interkoneksi

1. Melodrama KKN

Minggu pertama peserta KKN tinggal di lokasi, penulis berkunjung ke lokasi KKN pada saat menjelang magrib. Saya terus mengamati aktivitas peserta KKN dari jarak yang relatif dekat sehingga memungkinkan saya mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota kelompok. Nampaknya, sebagian besar dari anggota kelompok belum mandi. Begitu iqomah terdengar dari masjid yang tidak terlalu jauh dari posko KKN, saya bergegas ke masjid untuk salat jamaah sambil menunggu peserta KKN. Sampai jamaah salat magrib membubarkan diri, hanya ada satu peserta putri yang ikut salat berjamaah di masjid.

Di lain waktu, setelah salat subuh saya mendatangi posko KKN. Ketika saya sampai di posko, ternyata sebagian besar peserta KKN belum bangun dan tentunya belum melaksanakan salat subuh. Melihat kedatangan saya, sebagian peserta yang sudah bangun segera membangunkan teman-temannya yang lain. Yang ingin saya sampaikan dari cerita ini bukan mengapa mereka tidak salat, tetapi bagaimana mereka memaknai posisi mereka sebagai peserta KKN. Dalam konteks KKN, para peserta KKN harus memikul tanggungjawab sebagai motivator, dinamisator, inisiator dan mediator. Dalam bahasa paling sederhana, peserta KKN harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat di lokasi KKN.

Setelah dilakukan komunikasi intensif dengan para peserta KKN terkait ketidak hadirannya mereka di masjid, ternyata salah satu penyebabnya, karena teman-teman peserta KKN takut diminta menjadi imam salat dan atau khotib pada hari Jum'at. Sebagai peserta KKN dengan latarbelakang pendidikan keagamaan, tentu masyarakat berpikir bahwa semua mahasiswa KKN yang berasal dari universitas Islam tentunya memiliki kemampuan untuk menjadi imam salat dan khatib Jum'at. Hanya saja beberapa peserta laki-laki yang nota bene sebagian besar berasal dari Fakultas Ilmu sosial dan Humanioran, dan Fakultas Sain dan Teknologi merasa tidak mampu dan atau tidak layak untuk menjadi imam dan khatib.

Keengganan untuk hadir di masjid karena takut diminta menjadi imam salat dan mengisi khutbah, merupakan ironi bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Islam, apalagi dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia. Masyarakat tentu tidak peduli apakah sang mahasiswa berada di Fakultas Kegamaan atau Fakultas Sekuler. Masyarakat hanya tahu bahwa mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pastilah mampu kalau hanya untuk menjadi imam salat dan khotib Jum'at. Namun pada kenyataannya, ternyata walaupun menuntut ilmu di perguruan tinggi Islam tidak ada jaminan memiliki kecakapan untuk memimpin salat dan memberikan pengajian. Fenomena seperti harus disikapi secara cermat dan tepat oleh para pemangku kepentingan agar kedepannya ada proses standarisasi kemampuan dalam ilmu-ilmu keagamaan. Misalnya, begitu lulus dari UIN Sunan Kalijaga setiap mahasiswa UIN harus memiliki kemampuan untuk memimpin salat dan menjadi khatib Jumat apapun latar belakang fakultasnya.

Diwajibkannya semua mahasiswa mengikuti KKN secara ideal akan memberikan manfaat yang laur biasa bagi bangsa, negara, masyarakat, kampus, dan bagi mahasiswa itu sendiri. Hanya saja, karena sifatnya yang wajib (baca: memaksa), maka tidak semua peserta KKN mengikuti kegiatan KKN dilandasi oleh kesadaran penuh untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bagi yang sadar, KKN menjadi akan medan untuk menempa diri secara nyata dalam masyarakat. Sedangkan bagi yang hanya ingin menggugurkan kewajiban, maka KKN akan menjadi belenggu yang menyiksa.

Bagi yang mengikuti KKN hanya untuk menggugurkan kewajiban, biasanya akan menjalankan KKN sekedar formalitas saja, baik rencana programnya maupun pelaksanaannya. Bahkan tidak mustahil, mereka menjadi *trouble maker*. Jika mereka menjadi *trouble maker*, bukan hanya peserta yang se kelompok yang dirugikan, tetapi juga masyarakat dan kampus sebagai institusi yang menyelenggarakan KKN. Keengganan masyarakat untuk dijadikan lokasi KKN bukan mustahil diakibatkan oleh kekecewaan mereka terhadap KKN sebelumnya.

2. Rangkaian Tahapan Pelaksanaan KKN

a. Rekrutmen dan Pembekalan

Tahapan paling awal dari proses KKN adalah rekrutmen dan pembekalan. Rekrutmen merupakan kegiatan untuk mengundang dan menseleksi mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti KKN. Jika mahasiswa yang mendaftar memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya adalah proses pembekalan. Proses pembekalan sangat penting untuk memberikan seperangkat pengetahuan kepada calon peserta KKN sebagai bekal memasuki dunia nyata yang relatif berbeda dengan bangku kuliah. Jika bangku kuliah cenderung mengutamakan ranah *knowledge*, maka dalam KKN selain *knowledge*, juga perlu digunakan ranah afeksi dan psikomotriknya. Persoalannya adalah sebagai peserta KKN tidak mengerti apa yang harus dilakukan sebagai peserta KKN. Hal ini tentu bukan kesalahan mahasiswa dan atau pihak LPM, karena mahasiswa sejak awal memang tidak pernah didik bagaimana caranya mempraktekkan ilmunya di masyarakat.

b. Tahap Observasi

Secara sederhana, ada tiga hal yang dapat dilakukan pada tahap awal observasi, yaitu menemui induk semang dan atau kepala dusun, memastikan mekanisme makan dan tempat tidur, serta identifikasi problem dengan melihat 3 P (person, place, dan paper). Dalam mengidentifikasi problem, ada dua hal yang harus dilakukan yaitu: melakukan identifikasi masalah umum dan identifikasi masalah khusus sesuai dengan fakultas atau jurusan masing-masing. Oleh karena itu, semua peserta KKN harus melakukan observasi terlebih dahulu.

Dalam melakukan observasi, masing-masing peserta KKN harus memiliki catatan hasil observasi yang terkait dengan: informasi umum tentang lokasi KKN dan informasi khusus informasi yang terkait

dengan bidang studi masing-masing. Jika setiap peserta KKN mempunyai catatan hasil observasi, tentunya kasus-kasus plagiasi RPK tidak akan ada. Plagiasai RPK tidak saja menjadi indikasi lemahnya tanggungjawab peserta, tetapi juga merupakan kegagalan pelaksanaan KKN. Jika RPK diplagiasi, dan hanya diganti nama lokasinya saja, maka tujuan dan manfaat KKN tidak akan pernah tercapai. Pemerintah tidak akan mendapat sumbangan apa-apa dalam proses peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat tidak dapat mengambil manfaat dari keunggulan yang dimiliki para peserta, kampus tidak akan mendapat umpan balik keilmuan, dan mahasiswa KKN tidak akan mendapatkan tambahan nilai apa-apa.

c. Penyusunan Rencana Program kerja

Catatan-catatan tangan hasil observasi lapangan terhadap *person*, *paper*, dan *place* merupakan bahan utama untuk membuat program kerja. Dengan berdasarkan catatan lapangan tersebut, ada empat keuntungan yang dapat dilakukan oleh peserta KKN, yaitu:

- 1) Merumuskan program KKN berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan merencanakan program kerja yang dibutuhkan masyarakat, maka ada peluang besar program yang direncanakan tidak saja akan memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi juga akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Misalnya dari hasil observasi ditemukan bahwa masjid rajek wetan dulunya digunakan untuk kegiatan TPA. Namun belakangan ini tidak lagi berjalan karena tidak adanya tenaga pengajar. Dari hasil observasi ini, dapat dibuat program penghidupan kembali TPA dan pelatihan guru TPA. Untuk menghidupkan TPA, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, seperti sosialisasi pentingnya belajar al-quran di kalangan orang tua dan penyediaan buku iqra' dan poster-poster keagamaan.

Untuk membuat program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat tidak telalu sulit, tetapi tidak juga mudah. Berikut dua persoalan yang ditemukan oleh peserta KKN dalam observasi dan sekaligus program kerja yang direncanakan. *Pertama*, para pemuda terbagi kedalam dua kelompok. Kelompok preman dan kelompok masjid. Kedua kelompok ini sangat sulit untuk dipertemukan. Mendapat data tersebut, sang peserta membuat rencana program “penyuluhan pentingnya organisasi.” Pertanyaannya adalah apakah penyuluhan tersebut dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemuda? Jika melihat hasil observasi tersebut, menurut hemat saya buka dengan memberikan penyuluhan kepada para pemuda pentingnya organisasi, tetapi bagaimana agar kedua pemuda tersebut bisa bermain dalam arena yang sama. Misalnya buat program dalam bidang olahraga yang memungkinkan kedua kelompok bisa saling berintraksi. *Kedua*, di dusun rajek wetan hampir semua penduduknya berternak kambing. Berdasarkan hasil observasi tersebut, peserta KKN merencanakan program “penyuluhan asuransi syariah hewan ternak”. Mungkin saja tujuan program tersebut baik, tapi apakah cukup diperlukan oleh masyarakat? Menurut hemat penulis, yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat peternak di Rajek Wetan adalah “Penyuluhan Penggemukan dan peningkatan kualitas hewan ternak” dan atau “ekonomisasi hewan ternak.

- 2) Dapat membuat program kerja yang transformatif dan mencerdaskan, serta terhindar dari program-program yang tidak bermutu dan lucu. Kekurangcermatan dalam melakukan observasi, apalagi yang tidak melakukan observasi, biasanya akan mendapatkan kesulitan untuk merumuskan dalam bentuk program kerja. Misalnya dalam observasi ditemukan bahwa disebuah masjid kondisi dan lingkungannya agak kotor, selain itu di dalam masjid juga tidak ada kitab suci al-Quran. Berdasarkan hasil temuannya tersebut, sang peserta KKN membuat rencana program kerja berupa pengadaan 3 buah sapu dan 10 al-quran. Sekilas, tidak ada yang salah dengan program kerja tersebut. Hanya saja apabila dicermati, kedua program kerja tersebut kurang bermutu dan terkesan lucu.

Komentar sederhana yang dapat dilontarkan terhadap kedua program tersebut adalah (1) Kalau cuma untuk membeli tiga sapu dan 10 al-Quran, mengapa harus KKN? Minta saja sumbangan pada orang kaya, pasti teratasi (2) “jika sudah ada tiga buah sapu apakah masjid akan menjadi bersih?” dan (3) “jika di dalam masjid ada 10 al-quran, apakah orang-orang yang datang ke masjid tersebut akan tertarik untuk mengaji?”.

Kemungkinan jawaban dari kedua pertanyaan terakhir adalah ungkapan tidak. Karena pengadaan sapu dan al-Quran tidak akan berdaya guna apa-apa. Agar bermutu, maka program kerja yang dapat dilakukan dari dua hasil observasi tersebut adalah: (1) Peningkatan kesadaran “bersih” masyarakat sekitar masjid. Untuk mencapai kondisi sadar tersebut, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, seperti penyuluhan tentang kebersihan dan pandangan Islam tentang kebersihan, dan pengadaan peralatan kebersihan. (2) peningkatan kesadaran pentingnya membaca al-quran. Untuk menunjang program ini, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, seperti penyuluhan pentingnya membaca al-Quran dan kegiatan tadarus al-Quran. Dengan mengagendakan kedua program tersebut, maka peserta KKN telah membuat program yang transformative dan mencerdaskan.

- 3) Dapat membuat program kerja yang memposisikan peserta KKN sebagai motivator, inisiator, dinamisator, inovator, dan mediator. Kemampuan secara tepat memetakan problem yang dihadapi masyarakat berdasarkan data observasi akan memberi ruang yang besar kepada peserta KKN untuk memunculkan gagasan-gagasan baru. Misalnya, hasil observasi menemukan bahwa di dusun Sanggrahan banyak terdapat ruang-ruang kosong. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat dibuat program penghijauan menggunakan tumbuhan produktif. Untuk menopang program kerja tersebut, dapat dibuat penyuluhan tentang lingkungan hidup dengan mengundang penyuluh dari instansi terkait, dan lain sebagainya. Dengan program demikian, peserta KKN telah memposisikan dirinya sebagai inisiator dan mediator.
- 4) Selain itu, juga menghindarkan peserta KKN dari posisi sebagai pekerja/buruh intelektual. Adakalanya, kehadiran peserta KKN dianggap oleh masyarakat sebagai tenaga kerja gratis. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan masyarakat dibebankan kepada peserta KKN.

Hanya saja berdasarkan pengamatan terhadap proses pembuatan RPK yang dilakukan oleh mahasiswa, cara seperti terlalu memberatkan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari RPK yang terkesan asal-asalan, demi formalitas pencairan dana bantuan. Agar program semakin bermutu, ada baiknya pihak panitia melakukan inventarisir sebanyak-banyaknya program yang bisa dilaksanakan oleh peserta KKN. Dengan adanya inventarisir tersebut, peserta KKN sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing tinggal mencocokkan dengan program-program yang telah ditawarkan oleh panitia. Dengan cara ini, selain waktu yang diperlukan untuk membuat program relatif sedikit, mutu program juga lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan lebih lanjut terjadi ketika program yang dibuat RPK membutuhkan dana relatif besar. Pasca disetujuinya RPK oleh DPL, mahasiswa disibukkan oleh proses penyebaran proposal untuk menjaring dana sebanyak-banyaknya. Proses pencarian dana sebenarnya cukup bagus untuk melatih mental dan kemampuan inisiatif mahasiswa, tetapi yang terkadang sebaliknya, dimana peserta KKN meninggalkan posko dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk menggalang dana dengan biaya yang juga tidak sedikit, tetapi hasilnya tidak seberapa.

3. Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kerja

Setelah rencana disusun, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan program kerja dan diakhiri dengan pelaporan hasil pelaksanaan program kerja. Untuk melaksanakan program kerja, maka yang harus

dialkukan pertama kali adalah melakukan sosialisasi kepada segenap masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan berperan aktif dalam pelaksanaan program kerja. Salah satu indikasi diterimanya program kerja dari masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara antusias dalam pelaksanaan program. Demikian juga sebaliknya, jika masyarakat bersikap acuh terhadap pelaksanaan program, kemungkinan program tersebut kurang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

Program penyuluhan pentingnya organisasinya misalnya, walaupun ide dasar yang berada dibaliknya begitu kuat, tetapi karena tidak dianggap penting oleh masyarakat, maka begitu dilaksanakan hampir tidak yang hadir. Artinya program tersebut gagal total. Lain halnya dengan pelatihan pembuatan keterampilan manik-manik, oleh karena masyarakat membutuhkannya, peserta yang hadir melebihi ekspektasi. Minuman dan makanan ringan yang disediakan tidak mencukupi. Bahkan, kaum ibu-ibu juga meminta agar acara serupa dilaksanakan kembali.

D. KKN Integrasi-interkoneksi UIN Sunan Kalijaga

KKN jika dijalankan sesuai dengan sifatnya yang fundamental, seperti keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; pendekatan interdisipliner dan komprehensif; lintas sektoral; dimensi yang luas dan pragmatis; dan keterlibatan masyarakat secara aktif, maka KKN dengan sendirinya telah dilaksanakan dengan secara integratif dan interkoneksi. Dalam program KKN, integrasi dan interkoneksi dapat dilakukan dalam semua level, baik filosofis, metodologis, materi, ataupun strategi.

Bagaimana KKN integrasi dan interkoneksi harus dijalankan? Apakah karena menerapkan paradigma integrasi-interkoneksi kegiatan TPA, pengelolaan masjid, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan yang bernuansa keagamaan lainnya menjadi tidak penting? Dalam konteks perguruan tinggi Islam, semua kegiatan tersebut sangat penting. Malahan, hemat penulis, dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi kualitas program-program keagamaan tersebut akan semakin baik, sehingga azas kemanfaatannya juga akan semakin besar. Yang kurang tepat adalah ketika mahasiswa KKN dari UIN Sunan Kalijaga hanya membatasi pada program-program keagamaan semata, dan menutup diri pada program-program non keagamaan.

Perkembangan zaman menuntut setiap ilmu harus saling berkomunikasi untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan. Tidak ada lagi ruang bagi ilmu-ilmu khusus yang secara eksklusif memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan sosial. Korupsi misalnya, tidak bisa hanya menggunakan pendekatan normatif keagamaan, tetapi juga membutuhkan ilmu-ilmu lain, seperti psikologi, politik, dan ekonomi. Demikian juga persoalan kenakalan remaja, tidak bisa hanya persoalan psikologi perkembangan, tetapi juga, misalnya, perlu melibatkan ilmu agama, sosiologi, dan etika.

Untuk menghidupkan kembali TPA yang sudah lama mati karena ditinggal gurunya misalnya, kita tidak cukup hanya dengan menghadirkan seorang guru. Tetapi kita juga perlu memikirkan biaya operasionalnya, gaji gurunya, pengadaan sarana belajarnya, dan lain sebagainya. Untuk mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kita tidak cukup hanya menggunakan logika agama dan menceramahi mereka dengan ayat-ayat al-Quran. Tetapi kita perlu teori-teori ekonomi untuk memunculkan semangat berekonomi, membutuhkan bantuan bank untuk mendapatkan permodalan, membutuhkan skill entrepreneur sebagai modal untuk menjadi pengusaha, membutuhkan psikologi untuk menumbuhkan kembali semangat untuk sukses, dan membutuhkan agama untuk menumbuhkan sikap ikhlas dan tawakkal dalam berusaha. Demikian juga dengan problem-problem lainnya. Artinya, peradaban dunia baru memerlukan pendekatan keilmuan yang non-dikhotomis.

Program-program yang direncanakan oleh peserta KKN UIN Sunan Kalijaga harus bersifat holistik dan melepaskan diri dari belenggu dikotomi keilmuan yang telah berlangsung sejak alam. Dengan paradigma integrasi-interkoneksi, mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki peluang

sangat besar untuk memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dari mahasiswa-mahasiswa KKN yang berasal dari perguruan tinggi umum. Keunggulan utama mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga adalah nilai dasar yang hendak dikembangkan, yaitu berasal dari nilai-nilai keislaman. Ada ruh yang ditanamkan dalam setiap perubahan

Jika prinsip dasar KKN dikontekskan dengan tujuan KKN serta manfaat KKN yang diharapkan, maka kita akan menemukan paradigma baru dalam pelaksanaan KKN. Paradigma baru tersebut adalah pemuliaan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. KKN dapat memuliakan manusia sebagai makhluk sosial, apabila program KKN yang dilakukan menyentuh semua bagian dari masyarakat, tanpa terkotak-kotak oleh wilayah keagamaan dan non keagamaan. Oleh karena itu, dalam membingkai KKN ada tiga prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu *socializing*, *skilling*, *organizing*. Dengan bingkai tersebut, KKN akan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.

E. Kesimpulan

Untuk merumuskan program kerja berparadigma interkoneksi-integrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi semua persoalan masyarakat, tanpa dibatasi oleh pandangan agama non agama. Dari hasil identifikasi tersebut, baru dirumuskan dalam program kerja yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip interdisipliner dan komprehensif; lintas sektoral; dimensi yang luas dan pragmatis; serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam pelaksanaannya KKN juga harus mengadopsi prinsip sosialiasi, keahlian dan kemampuan manajerial. Selain itu, program-program harus dibangun berdasarkan atas kebutuhan masyarakat, bukan menggunakan paradigma agama dan non agama. Dengan cara seperti ini, peserta KKN UIN Sunan Kalijaga tidak sekedar tukang ceramah, tetapi juga seorang inovator, motivator, inisiator, dinamisator, dan mediator.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor positif terlaksananya KKN secara integrasi-interkoneksi adalah (1) Secara prinsip, KKN dilakukan memang dilakukan integrasi-interkoneksi, yaitu keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; pendekatan interdisipliner dan komprehensif; lintas sektoral; dimensi yang luas dan pragmatis; dan keterlibatan masyarakat secara aktif. (2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara formal telah menjadikan paradigma integrasi-interkoneksi sebagai *core values* keilmuan UIN Sunan Kalijaga. (3) Masyarakat semakin sadar bahwa persoalan-persoalan kemasyarakatan tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu disiplin keilmuan secara eksklusif.

Selain faktor pendukung tersebut, ada hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan KKN berparadigma integrasi dan interkoneksi, antara lain: (1) secara teoritis, KKN berparadigma integrasi-interkoneksi belum memiliki landasan teori yang kuat sehingga siapapun dapat memaknai paradigma integrasi-interkoneksi sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. (2) Sebagian besar peserta KKN masih belum memahami apa yang dimaksud dengan KKN integrasi dan interkoneksi, sehingga program yang direncanakan dan dilaksanakan belum didesain berdasarkan paradigma integrasi-interkoneksi. (3) Sebagian peserta KKN belum menyadari bahwa KKN merupakan bagian integral dari kurikulum pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga, tetapi masih melihat KKN sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban. (4) Pelaksanaan KKN secara keseluruhan masih terkesan proyek. Hal ini dapat dilihat dari ukuran kesuksesan KKN tidak pada proses dan hasil KKN, tetapi lebih kepada terlaksananya KKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi R. Thahir. 2006. "Pola Pelatihan Kader Bagi Masyarakat" (*makalah*). Jakarta: LPM Universitas Trisakti.
- Akhmad Sudrajat. "Pendekatan Sosial dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata" (KKN) (*makalah*).
- Amin Abdullah. 2010. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin Abdullah. 2010. "Integrasi dan Interkoneksi: Pengembangan Paradigma Keilmuan (teori-Praxis) di UIN Sunan Kalijaga" dalam *Workshop Pengembangan Calon Dosen UIN Sunan Kalijaga Angkatan I*. 11 Oktober 2010
- Azyumardi Azra. (2003) *IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi*, Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam, Vol. VI/No. 02/2003
- Francisco Budi Hardiman (1990) *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gerungan, WA. 1977. *Psychologi Sosial*. Bandung : Eresco.
- Hanna Djumhana Bastaman. (1995) *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huzni Thoyyar. "Model-Model Integrasi Ilmu dan Upaya Membangun Landasan Keilmuan Islam (Survey Literatur terhadap Pemikiran Islam Kontemporer)" (*makalah*).
- Indal Abror (ed). 2010. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. LPM UIN Sunan Kalijaga.
- Jalaluddin Rakhmat. 1985. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : C.V. Remaja Karya.
- Joko Prastowo dan Eko Agus Suyono (ed). 2007. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007
- Kartika Wangsarhardja. 2006. *Pendekatan Sosial* (*makalah*). Jakarta: LPM Universitas Trisakti.
- Kartika Wangsarhardja. 2006. *Penyuluhan Kepada Masyarakat* (*makalah*). Jakarta: LPM Universitas Trisakti.
- Mulyadhi Kartanegara. (2005) *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy (Mizan Group).
- Yuni Retna Dewi. "Teknik Komunikasi Pada Proses Pendekatan Masyarakat" (*makalah*). Jakarta: LPM Universitas Trisakti.